

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan umkm di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan positif dan signifikan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa disebut juga dengan tulang punggungnya perekonomian di Indonesia dikarenakan memberikan dukungan yang cukup banyak kepada perekonomian Indonesia. UMKM ikut menyumbang untuk produk domestik bruto (PDB) sebesar sekitar 60% dan dapat menyerap sumber daya manusia sebesar lebih dari 97%. Menurut data dari Kementerian UMKM, jumlah UMKM lebih dari 65 juta atau hampir mencapai 66 juta unit usaha yang ada di semua daerah yang berada di Indonesia, pada desember 2024 Kementerian UMKM menyampaikan terdapat 99,9% atau 65,5 juta unit UMKM termasuk kepada usaha mikro kecil, dan terdapat 0,01% UMKM termasuk kepada usaha menengah yaitu sebesar 5.550 unit usaha.¹

Inklusivitas keuangan syariah di Indonesia saat sekarang ini memiliki perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun inklusivitas keuangan syariah mengalami perkembangan tetapi masih banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi seperti literasi dan inklusi keuangan syariah perlu ditingkatkan lagi supaya semua kalangan masyarakat banyak mendapatkan

¹ Perbana Institute, "UMKM Berkelanjutan Kunci Masa Depan Ekonomi Indonesia," perbanas.id, Januari 2025

manfaatnya. Pemerintah dan lembaga keuangan haruslah memperhatikan masyarakat terkait dengan keuangan dan memberikan edukasi keuangan

Di Indonesia mempunyai peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena memiliki potensi muslim yang besar. Akan tetapi, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada di tingkat yang rendah, meskipun pada tahun terakhir ini tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia ada peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat literasi syariah sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024.²

Tingkat inklusi keuangan syariah sendiri yang nilainya sebesar 12,88% yang artinya, masyarakat di Indonesia mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan atas konsep dan produk keuangan syariah. Akan tetapi, masyarakat Indonesia tidak benar-benar menggunakan dan mengakses layanan keuangan syariah itu, sehingga terjadilah kesenjangan dalam masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan adanya hambatan pada penerapan pengetahuan yang ada ke dalam praktik, seperti keterbatasan akses fisik terhadap layanan keuangan syariah, kurangnya layanan mengenai kebutuhan, atau persepsi bahwa produk dari keuangan syariah itu yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional

Inklusivitas keuangan syariah memiliki arti bahwa seluruh masyarakat mencakup masyarakat kecil, menengah, dan atas mendapatkan akses yang sama

² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, "Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui SBSN Ritel," djppr.kemenkeu.go.id, November 2024

terhadap layanan keuangan syariah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³ Faktor karakteristik pemilik UMKM yang mempengaruhi inklusivitas keuangan syariah adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha.⁴

Jenis kelamin pemilik UMKM dapat berpengaruh dan memiliki hubungan terhadap inklusivitas keuangan syariah, hal dikarenakan jenis kelamin dapat mempengaruhi pola pengambilan keputusan keuangan, akses terhadap sumber pembiayaan atau permodalan, serta preferensi untuk memilih produk dari keuangan syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan perempuan lebih tinggi, yaitu indeks inklusi keuangan perempuan sebesar 76,08% sedangkan laki-laki hanya sebesar 73,97%.⁵

Tingkat pendidikan pelaku UMKM juga diperlukan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai inklusivitas keuangan syariah. Pemilik UMKM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya lebih banyak mempunyai pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga memungkinkan mereka lebih mudah mendapatkan informasi perihal produk keuangan syariah dan layanan keuangan syariah. Pemilik UMKM yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mereka

³ Kementerian Keuangan Indonesia, Januari 2025

⁴ Rabi'ah Rasyid dan Sulaman Hafeez Siddiqui, Attitude for inclusive finance: influence of owner-managers' and firms' characteristics on SMEs financial decision making, *Journal of Economic and Administrative Science*, 2019

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Januari 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024/SP%20OJK%20dan%20BPS%20Umumkan%20Hasil%20Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20Tahun%202024.pdf>

mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transaksi keuangan syariah. Sehingga kredibilitas terhadap lembaga keuangan syariah akan ikut meningkat seiring dengan pemahaman lebih mendalam tentang sistem perbankan syariah, kemudian mereka dapat memanfaatkan berbagai instrumen keuangan yang ada.⁶

Jenis usaha dapat mempengaruhi dan berhubungan dengan persepsi pemilik UMKM terhadap inklusivitas keuangan syariah. Hal ini dikarenakan setiap sektor usaha atau jenis usaha memiliki kebutuhan keuangan yang berbeda seperti kebutuhan pembiayaan, risiko, dan kebutuhan operasional lainnya yang pasti berbeda. Misalnya, jenis usaha yang berprinsip pada prinsip syariah baik pada sektor ritel, kerajinan maupun jasa. Jenis usaha yang memiliki prinsip syariah berhubungan yang erat dengan pembiayaan syariah yang disebabkan oleh prinsip yang dipakai kedua belah pihak adalah sama-sama prinsip syariah. Sehingga jenis usaha seperti ini berhubungan positif terhadap inklusivitas keuangan syariah⁷

Perkembangan UMKM di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan dilihat dari segi jumlah umkm di Sumatera Barat meningkat mencapai 593.100 unit umkm pada tahun 2020 yang dimana usaha mikro yang lebih mendominasi sebesar 553.00 unit, usaha kecil sebesar 38.000

⁶ Putri Nuraini, Dkk, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*, Vol. 6, No. 1, Mei 2023

⁷ Nandanisasi Anjarkasih, Persepsi Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Yang Ada Di Kecamatan Ponorogo), Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

unit, dan usaha menengah 3.000 unit, salah satu UMKM yang ada di Sumatera Barat adalah UMKM di Kota Padang.

Kota Padang merupakan ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai UMKM yang sangat pesat. Berdasarkan data UMKM yang diambil dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berikut datanya

Tabel 1. 1 Data Usaha Mikro Kota Padang Tahun 2024

No.	Kecamatan	Usaha Mikro	Kuliner kemasan	Kuliner saji	Ritel	Kerajinan	Jasa
1	Padang Barat	4.320	216	1.922	1.699	51	432
2	Padang Selatan	4.530	500	1.841	1.761	82	346
3	Padang Timur	4.791	395	1.694	2.042	119	541
4	Padang Utara	3.352	308	1.207	1.369	121	347
5	Nanggalo	2.411	305	841	897	63	305
6	Koto Tangah	7.276	875	2.064	3.350	282	722
7	Kuranji	7.095	769	2.051	3.120	311	846
8	Pauh	3.570	298	1.040	1.739	115	378
9	Lubuk Kilangan	2.336	239	672	1.058	85	282

No.	Kecamatan	Usaha Mikro	Kuliner kemasan	Kuliner saji	Ritel	Kerajinan	Jasa
10	Lubuk Begalung	5.764	592	1.623	2.693	191	665
11	Bungus Teluk Kabung	2.247	183	637.42	1.074	18	194
Jumlah		47.692	4.680	15.592	20.802	1.438	5.058

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Dari total 47.692 unit usaha mikro yang ada di Kota Padang pada tahun 2024, pada penelitian ini yang digunakan Kecamatan Koto Tangah karena merupakan kecamatan yang memiliki usaha mikro terbanyak di kota padang. Keseluruhan usaha mikro di kecamatan Koto Tangah terdapat keragaman jenis usaha yang dijalankan, antara lain kuliner kemasan sebanyak 875 unit, kuliner saji 2.064 unit, ritel 3.350 unit, kerajinan 282 unit, dan jasa 722 unit. Dari keseluruhan wilayah, Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan dengan jumlah usaha mikro terbanyak sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian, karena dinilai mampu merepresentasikan kondisi usaha mikro di Kota Padang secara lebih menyeluruh.

Penelitian ini difokuskan pada usaha mikro di Kecamatan Koto Tangah, dengan penekanan pengambilan sampel pada Kelurahan Lubuk Buaya, Tabing, Balai Gadang, Lubuk Minturun, dan Ikur Koto. Pembatasan wilayah ini merupakan bentuk delimitasi penelitian, yaitu upaya peneliti untuk

memperjelas ruang lingkup agar data yang diperoleh lebih fokus, terukur, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi tidak dimaksudkan untuk mencakup keseluruhan kelurahan, melainkan menggunakan prinsip purposive area selection, yakni memilih daerah yang dinilai relevan dan strategis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Kelurahan yang dipilih memiliki variasi usaha dan karakteristik sosial ekonomi yang dapat merepresentasikan dinamika usaha mikro di Kecamatan Koto Tengah, sehingga meskipun tidak mencakup seluruh wilayah, hasil penelitian tetap memiliki validitas akademis dan dapat dijadikan rujukan untuk memahami keterkaitan karakteristik pemilik usaha mikro dengan inklusivitas keuangan syariah.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan kepada 5 pemilik UMKM di kecamatan koto tengah, kota Padang dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 orang pemilik UMKM memiliki persepsi positif terhadap inklusivitas keuangan syariah⁸ dan 2 orang pemilik UMKM memiliki persepsi ragu-ragu terhadap inklusivitas keuangan syariah.⁹ Pelaku UMKM di Kota Padang menunjukkan persepsi yang positif terhadap inklusivitas keuangan syariah, namun masih terbatas dari sisi pemahaman teknis, kepercayaan terhadap sistem, dan aksesibilitas aktual.

Penelitian yang membahas inklusivitas keuangan syariah banyak akan tetapi, penelitian yang membahas tentang hubungan karakteristik pemilik UMKM terhadap inklusivitas keuangan syariah masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan pengamatan fenomena yang telah dijelaskan

⁸ Febri Eka Putra, Ridho Raditya, Sepri Yeni ., Pemilik Umkm, *Wawancara* (Koto Tengah, 26 & 27 Februari 2025

⁹ Tesa & Vivi Ramadhani., Pemilik UMKM, *Wawancara* (Koto Tengah, 26 Februari 2025

sebelumnya penulis ingin meneliti tentang inklusivitas keuangan syariah terhadap masyarakat terkhususnya yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Koto Tengah, Kota Padang yang mana akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “HUBUNGAN KARAKTERISTIK PEMILIK UMKM DENGAN INKLUSIVITAS KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG MENGGUNAKAN METODE CROSS TABULATION”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan penulis teliti :

1. Bagaimana hubungan jenis kelamin pemilik UMKM dengan inklusivitas keuangan syariah ?
2. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan pemilik UMKM dengan inklusivitas keuangan syariah?
3. Bagaimana hubungan jenis usaha dengan inklusivitas keuangan syariah ?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi beberapa hal di dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan pada sektor usaha mikro yang beroperasi minimal 2 tahun di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan inklusivitas keuangan syariah berdasarkan jenis kelamin pemilik UMKM
2. Untuk mengetahui hubungan inklusivitas keuangan syariah berdasarkan tingkat pendidikan pemilik UMKM
3. Untuk mengetahui hubungan inklusivitas keuangan syariah berdasarkan jenis usaha UMKM

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua orang seperti :

1. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dijadikan sumber ilmu dan referensi mengenai Perspektif Inklusivitas Keuangan Syariah Berdasarkan Karakteristik Pemilik UMKM.

2. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa atau siapapun yang membaca penelitian ini dalam hal literasi Perspektif Inklusivitas Keuangan Syariah Berdasarkan Karakteristik Pemilik UMKM .

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi dan pedoman dan juga sebagai bahan perbandingan bagi pihak yang mengadakan penelitian di bidang yang sama.

4. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai implementasi ilmu manajemen yang telah penulis dapatkan selama berkuliah di Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang mencakup beberapa unsur, seperti latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat melakukan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup evaluasi literatur komprehensif yang menggabungkan teori-teori terkait sebagai sumber penulis, termasuk teori-teori yang berkaitan dengan subjek yang dibahas serta penelitian dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan metodologi penelitian yang tertulis gunakan yang berhubungan dengan permasalahan untuk pemecahan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai pedoman serta alat analisis

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan dan saran sebagai penutup dari sebuah skripsi, supaya pembaca dapat melihat kesimpulan dari skripsi ini.